

H A R I A N

# LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN UNTUK UMUM  
TERBIT SENIN - JUMAT  
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com  
Redaksi 031-87854491  
Iklan 031-87854491  
Kantor Redaksi  
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26  
Surabaya

"Begitu kamu menjadi seorang ibu, kamu akan selalu merasa bersalah. Kamu selalu berusaha melakukan yang terbaik. Tetapi kamu merasa kamu (seharusnya) bisa lebih baik."

Gal Gadot, Aktris

EDISI JUMAT / 19 Juni 2020

# KPK ENDUS MASALAH KARTU PRAKERJA



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 4 masalah program kartu prakerja. Tak hanya itu, komisi anti-rasuah ini juga 'mengendus' adanya potensi kerugian negara. Mitra kartu prakerja juga dinilai sarat akan kepentingan. Untuk itu pihaknya menyarankan agar realisasi kartu prakerja tahap ke-4 ditunda dulu. Apalagi anggaran yang dialokasikan tak tanggung-tanggung, sebesar Rp 20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang.

Baca Hal 11

## 4 MASALAH YANG DITEMUKAN KPK

- Proses pendaftaran.
  - Ditemukan 9,4 juta pendaftar bukan target yang disasar
  - Penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp 30,8 miliar tidak efisien
- Kemitraan dengan platform digital  
KPK mendapati kerja sama dengan 8 platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. 5 diantaranya memiliki konflik kepentingan
- Materi pelatihan  
Hanya 13 % kurasi materi pelatihan yang kompetensinya memadai
- Pelaksanaan program  
Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara.

### TENTANG KARTU PRAKERJA



#### PESERTA

- 5,6 juta orang pekerja informal & pelaku UMKM
- 2 juta orang



#### INSENTIF

- 2,4 juta / orang
- Rp 650 ribu / orang



#### ANGGARAN PEMERINTAH

- Rp. 20 triliun
- Rp 10 triliun

---Jumlah sebelumnya

### KARTU PRAKERJA

#### DALAM PANDEMI COVID-19

- Termasuk program jaringan pengamanan social pemerintah
- Memberikan bantuan pendapatan
- Mengurangi beban hidup dan tekanan ekonomi
- Meningkatkan daya beli
- Meningkatkan / menambahkan kemampuan pekerja

## UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

	KASUS POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
INDONESIA	42,762	16,798	2,339
Seluruh Dunia	8,359,869	4,087,172	449,229

Update : 18 Juni 2020 Pukul 16.02 PM

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins

## CATAT REKOR KASUS LAGI, SURABAYA BILANG DATA CORONA PEMPROV JATIM TAK VALID

Surabaya –Penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia dalam 24 jam, Kamis (18/6) mencatatkan jumlah tertinggi yakni 1.331 kasus. Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi penyumbang kasus terbanyak yakni 384 kasus.

Di saat kondisi wilayah masih 'merah pekat', adu argument kembali mencuat antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jatim. Pemkot meragukan validitas data kasus confirm yang diklaim oleh Pemprov Jawa Timur. Kekeliruan data tersebut bahkan diklaim hingga separuh atau menyentuh angka 50 persen lebih.

"Jadi pernah saya dapat angka 280 confirm dari provinsi, itu setelah kita teliti ternyata hanya 100. Setelah kita cek lihat (lapangan) ternyata (sisanya) itu bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri oleh Puskesmas orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu," kata Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita alias Feny dikutip Kamis (18/6).

Ia menyatakan, beberapa hari terakhir data confirm Covid-19 warga Surabaya yang diterimanya dari Gugus Tugas Provinsi Jatim setelah di tracing ternyata tidak sesuai fakta di lapangan. Misalnya, pada tanggal 14 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 180 kasus confirm warga Surabaya, namun setelah dicek di lapangan hanya 80 orang. Kemudian, pada tanggal 15 Juni 2020, data confirm yang diterima 280 orang, dan setelah dicek hanya 100. Lalu pada tanggal 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus terkonfirmasi

warga Surabaya dan setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang.

"Kita lakukan pengecekan. Begitu kita dapat data dari provinsi, puskesmas akan mencari apakah benar orangnya ada di situ, apakah benar orang itu tinggal di situ, apakah benaramatitu ada," katanya.

Menurut dia, adanya perbedaan data antara Gugus Tugas Provinsi Jatim dan kota karena ada nama maupun alamat yang ganda. Bahkan, ada pula data yang setelah di tracing ternyata orang itu sudah tidak tinggal atau domisili di Surabaya, meski masih menggunakan KTP Surabaya. Ketidak-sinkronan data ini persentasenya diklaim bisa mencapai di atas 50 persen.

Dia berharap Gugus Tugas Jatim melakukan verifikasi dan validitas data pasien dengan cermat sebelum data konfirmasi positif warga Surabaya disampaikan ke publik.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono membantah tuduhan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya yang menyebut bahwa data pasien positif yang dirilis pihaknya tak valid.

"Selain mencari, ada laporan, dari dinas kabupaten/kota, dan kita cek juga, kita dibantu BNPB, ada dari dinas, dan tidak mungkin [tidak valid], sekali lagi nggak mungkin, ini adalah perang kita dengan Covid-19," kata Heru, Kamis (18/6).

Ia mengatakan data yang dirilis Pemprov Jatim melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim adalah data yang



riil dan didapat dari proses pelacakan, laporan masyarakat, BNPB dan dinas kesehatan di kabupaten/kota.

Heru menambahkan, kasus pandemi Covid-19 ini adalah tanggungjawab semua pihak. Sehingga, menurutnya tidak mungkin Pemprov Jatim mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Apalagi, data-data yang diperolehnya tersebut berasal dari Dinkes Kota / Kabupaten, maupun dari pusat. "Jadi sekarang ini pandemi adalah tanggungjawab kita semua. Kita tidak mungkin mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan lapangan, berdosa. Datanya banyak, ada yang dari dinkes, ada juga data yang dari pusat," ungkapnya.

Dikonfirmasi kemungkinan adanya salah data berdasarkan domisili, ia menyebut hal-hal semacam itu telah diselesaikan dengan baik. Sehingga, tidak menjadi masalah ketika data sudah terpublikasikan. "Misalnya ya, sakitnya di Sidoarjo, tinggalnya Surabaya. Nah itu sudah diclearkan, ndak mungkin lah, urusannya dengan orang mati. Dosa pak dosa, ngawur ae, berdosa," ujarnya. (ard, ufi)

## WACANA SURABAYA PSBB LAGI, INI KATA PEJABAT HINGGA PENGAMAT

Surabaya- Kasus Covid-19 di Jawa Timur (Jatim) mengalami penambahan terbanyak lagi. Dari angka 208 terkonfirmasi positif, 81 kasus baru ada di Surabaya. Padahal Surabaya Raya telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tiga tahap. Kini, sedang melangsungkan masa transisi menuju new normal. Haruskan Kota Pahlawan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lagi?

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono mengatakan kebijakan PSBB kota/kabupaten bukanlah wewenang Pemprov Jatim. Sebab PSBB di Kota Pahlawan menjadi wewenang Pemkot Surabaya. "Yang menentukan PSBB bukan pemerintah provinsi, atas usulan Kabupaten/kota, karena itu kewenangan Kabupaten kota PSBB itu, yang punya wilayah, sesuai Permenkes, diusulkan, gubernur hanya memediasi," ujarnya ketika di kantor DPRD Jatim, Kamis (18/6).

Ditanya mengenai kelaikan penerapan PSBB di Surabaya, Heru belum bisa menilai lebih jauh. Sebab, menurut dia, diperlukan kajian lebih dalam, termasuk data penunjang kondisi di lapangan. Meski begitu, pihaknya

sekarang ini lebih memilih fokus memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Kami menilai mesti harus dengan data, dengan bukti-bukti lapangan, sekarang ibu Gubernur sesuai arahan, Covid-19 Hunter sudah berjalan, bantuan rapid, pcr berjalan, itu artinya ingin menggali sampai di mana sebetulnya tingkat penularan penanganan Covid-19 tersebut," terang Heru.

Terpisah, Wakil Bidang Humas Gugus Tugas Surabaya, M. Fikser menuturkan bahwa pihaknya sedang bekerja untuk menekan angka kasus Covid-19 sekaligus memutar kembali roda perekonomian yang smpat lesu. Hal itu diakuinya berat, maka diharapkan partisipasi masyarakat bisa memulihkan kondisi saat ini.

"Artinya masyarakat sudah merasakan PSBB beberapa kali. Mereka juga ingin ekonomi bergerak. Tapi kesehatan jiwa, keselamatan jiwa itu juga sangat penting. Jadi kita berharap juga hal itu tidak terjadi di Surabaya. Dua-dua itu bisa berjalan," katanya.

"Makanya kita berharap masyarakat untuk sama-sama jangan sampai PSBB itu terjadi di Surabaya. Patuhi protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah. Disiplin menjadi kunci untuk tidak terkena

Covid-19," dia menambahkan.

Terpisah, Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr dr Windhu Purnomo mengatakan terlepas dari benar tidaknya wacana ini, dia menilai penyebutan atau istilah PSBB bukanlah hal yang penting.

Namun, yang terpenting adalah tindakan tegas pemerintah dalam mendisiplinkan warganya untuk menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

"Jadi kalau memang mau PSBB, silakan. Cuma bagi saya tidak penting dalam PSBB, yang penting yang penting itu kontrol pemerintah untuk mendisiplinkan warga memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan," kata dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair ini. Tak hanya itu, Windhu menilai warga Surabaya, Sidoarjo dan Gresik juga sudah jenuh dengan istilah PSBB. (ard, ufi, ist)



## MENYOAL DITANGKAPNYA PENGUNGGAH GUYONAN GUS DUR WAKIL KETUA KOMISI III DPR: ITU NASIHAT ABADI UNTUK KEPOLISIAN

Jakarta-Warga Kepulauan Sula, Maluku Utara, atas nama Ismail Ahmad dipanggil polisi lantaran mengunggah ucapan Presiden Ke-4RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur soal Tiga Polisi Jujur di akun media sosialnya. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan, kutipan Gus Dur ini merupakan pengingat bagi kepolisian untuk selalu menjadi abdi masyarakat yang lurus dan jujur.

"Menurut saya, kutipan ini adalah pengingat sekaligus nasihat abadi bagi kepolisian. Ini adalah pengingat untuk para polisi agar tetap bekerja sesuai koridor, amanah, dan lurus," kata Sahroni, Kamis (18/6).

Politikus Nasdem ini menambahkan, pernyataan dari ucapan Gus Dur ini tentu saja wajar jika digunakan di masyarakat, selama bukan digunakan untuk menyudutkan institusi kepolisian. "Wajar saja ya, karena kan tujuannya untuk mengingatkan, bukan dipelintir untuk menyudutkan institusi kepolisian. Jadi kita juga harus sama-sama fair, publik mengingatkan, polisi juga bisa menerima kritikan," ungkap Sahroni.

Meski begitu, dia menambahkan jika ada indikasi adu domba, maka pihak yang berwajib juga berhak mengambil tindakan yang diperlukan. "Ya intinya kalau tujuannya untuk mengadu domba boleh ditindak, namun jika tujuannya adalah untuk meng-

ingatkan maka tidak masalah," tegas Sahroni.

Dia pun meminta polisi lebih berhati-hati dalam menanggapi candaan dari masyarakat seperti dalam kasus mengutip ucapan Gus Dur soal polisi jujur. "Polisi juga bisa lebih berhati-hati dalam menanggapi candaan maupun kritikan dari masyarakat," pungkasnya.

Seperti diketahui, kutipan Gus Dur tersebut berbunyi, "Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: Patung Polisi, Polisi Tidur, dan Jenderal Hoegeng". utri Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab disapa Yenny Wahid mengatakan, jangan terlalu sensitif terhadap humor tersebut. "Jangan over sensitif terhadap ekspresi masyarakat. Yang namanya humor, yang namanya joke, lelucon, itu kan sudah bagian dari masyarakat kita," katanya.

Menurutnya, rakyat mendambakan aparat keamanan yang profesional, dan bisa memberikan rasa aman. Bukan yang mengintimidasi warganya. "Kritik apapun terima saja dengan lapang dada, apalagi humor ketawa saja bareng. Jika ada yang diperbaiki, perbaiki," lanjut Yenny.

Terpisah, Kapolres Kepulauan Sula AKBP Muhammad Irvan menyatakan, tidak ada penangkapan terhadap Ismail Ahmad. "Hanya kami panggil untuk klarifikasi tentang niat atau mens rea (sikap batin) maksud memposting hal tersebut," tutur Irvan.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni

Menurut Irvan, Ismail mengaku hanya iseng dan memang biasa menggunakan pernyataan dan kalimat tokoh untuk unggahan sosial media. "Yang bersangkutan minta maaf jika hal tersebut menyenggang institusi Polri, sehingga kami adakan press release untuk minta maaf dan bilang bahwa yang bersangkutan tidak ada niat apa-apa," jelas dia.

Irvan mengatakan, ini juga bertujuan agar masyarakat dapat bijak dalam bersosial media. Sekaligus menyampaikan terkait niat Ismail mengunggah kutipan Gus Dur. "Setelah itu yang bersangkutan pulang," tandasnya. (ist)

## KADES DI BLITAR JADI PENENTU PENDATAAN BANSOS CORONA

Blitar - Setelah puluhan kepala desa (kades) di Kabupaten Blitar yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa (APD) memprotes bupati terkait masalah data penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19, DPRD Kabupaten Blitar memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah ini. Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, bersama APD, dan dinas terkait yaitu Dinsos, Diskominfo dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 akhirnya melakuka hearing.

"Disampaikan koordinator lapangan APD, Bagas yang juga Kades Karangsono, Kecamatan Kanigoro. Para kades tidak mau jadi tumpuan kesalahan pendataan bansos, serta bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dilakukan. "Yang melakukan pendataan bukan kades, tapi ketika terjadi kesalahan data jadi sasaran kemarahan warga dan diminta bertanggung jawab," ujar Bagas dikonfirmasi Kamis (18/6).

Terutama tentang pendataan bansos terkait Covid-19, baik dari kabupaten, provinsi, pusat yaitu Kemensos, BPNT, maupun PKH. Para kades merasa menjadi korban pendataan penerima bansos, karena data yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. "Karena kondisi data yang karut marut dan tumpang tindih, seharusnya OPD leading sektor

database penerima bantuan yaitu Dinsos dan Kominfo harus ikut bertanggung jawab. Tidak hanya kepala desa yang menjadi kambing hitam," tandasnya.

Menanggapi keluhan dan kondisi ini Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Blitar, Tuti Komaryati mengakui pada tahap awal penyaluran bansos Covid-19 menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini sesuai Permen Dagri No 20 tahun 2020 yang meminta ada percepatan penanganan dampak Covid-19 untuk bidang kesehatan, ekonomi dan pengaman sosial.

"Karena mengacu data itu, sehingga saat ini bermasalah. Seperti dobel dan tidak tepat sasaran. Maka dalam hearing disepakati verifikasi dilakukan oleh pihak desa. Kemudian Dinsos diperintahkan berkoordinasi dengan kades dan camat untuk sinkronisasi data," kata Tuti yang juga Koordinator Bidang Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar.

Tuti juga menegaskan untuk pendataan selanjutnya, akan dilakukan dengan filter Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk warga yang tidak punya NIK, akan dicover dari bansos daerah yang kedua dan datanya disendirikan. "Yang penting disertai surat dari kepala desa bahwa yang bersangkutan benar-benar penduduk desa



Kades se-Kabupaten Blitar hearing dengan DPRD Kabupaten Blitar dan Pemkab Blitar

setempat," tegasnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso menyampaikan agar penyaluran bansos berikutnya tidak tumpang tindih atau semrawut, serta merugikan kades yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Disepakati antara gugus tugas dan dinas terkait, memberikan kewenangan kepada kades untuk melakukan pendataan dan mengirimkan data nama-nama yang layak menerima bantuan berikutnya.

"Dengan demikian kades tidak menjadi sasaran kesalahan atau kemarahan warganya, memang diakui data awal untuk bansos tahap pertama semrawut. Maka sebagai evaluasi, agar penyaluran bansos tahap berikutnya lebih baik," pungkasnya. (ais)

## DUH! SEBANYAK 137 ORANG MANGKIR RAPID TEST MASSAL DI JOMBANG

Jombang- Tim Dinas Kesehatan Provinsi Jatim menggelar rapid test massal di dua desa Kecamatan Sumobito, Jombang, Kamis (18/6). Dari target 225 orang, yang hadir hanya 88. Selebihnya, sebanyak 137 orang mangkir tanpa alasan.

Dua lokasi yang disasar petugas adalah Desa Badas dan Plosokerep, Kecamatan Sumobito. Masing-masing bertempat di balai desa. Di balai desa Badas, petugas sudah siaga sejak pagi. Mereka mengenakan APD (alat pelindung diri) lengkap. Hingga dua jam dibuka, hanya 42 orang yang mengikuti tes.

"Di Desa Badas, sebanyak 42 orang hadir. Padahal target kita 100 orang. Artinya, ada 58 orang yang mangkir dari pemeriksaan," kata Kepala Puskesmas Jogoloyo, Sumobito, dr Riski Kurniawati, di lokasi.

Rapid test massal kemudian dilanjutkan di Balai Desa Plosokerep. Target rapid test di desa tersebut sebanyak 125 orang. Namun hingga batas akhir, yang hadir hanya 46 orang. Dengan kata lain, ada 79 orang yang mangkir.

"Jadi jumlah total yang tidak hadir 137 orang. Kita sudah melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif. Namun mereka tetap saja tidak hadir. Alasannya, ada yang takut, ada juga yang sudah merasa sehat," kata Riski menambahkan.

Riski mengatakan, rapid test dilakukan berdasarkan hasil tracing yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Orang-orang tersebut melakukan kontak dengan pasien positif Covid-19. "Satu RT di Desa Plosokerep ada 27 orang yang positif. Ini sudah menjadi kluster," pungkas Riski.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Jombang dr Achmad Iskandar Dzulfornain memprediksi Jombang saat ini sedang proses menuju puncak kurva terkait kasus Covid-19. Ia mengatakan hal ini berdasarkan tren kasus di Jombang yang terus naik. Data hari ini positif Covid-19 di Jombang mencapai 178 orang.

"Kita akan segera mengalami puncak Covid, terlihat pada beberapa minggu ini kasusnya terus naik. Sehingga kita perlu meningkatkan kewaspadaan sampai tren ini Covid-19 menurun dan menurun," katanya, Rabu (17/6).

Menurutnya, Covid-19 kali ini adalah bencana nasional yang baru sekali ini punya pengaruh begitu luas. Tidak ada provinsi yang lepas dari Covid-19. Resiko terkait pandemi bisa dikurangi dengan melakukan tindakan kewaspadaan di tempat umum seperti pasar, kantor dan fasilitas umum lainnya.

"Pelajaran pertama, bahwa musuh yang kita hadapi ini sesuatu yang tidak tampak. Sehingga saat sulit diberikan pemahaman kepada kelompok tertentu," tambahnya.

Dokter Iskandar mengatakan pemerintah Jombang dalam dua minggu terakhir gencar melakukan pelacakan kasus dan rapid test. Ia mengingatkan, pemerintah perlu fokus dalam mengedukasi masyarakat. Sehingga masyarakat Jombang harus sudah terpahami tentang sikap saat new normal.

"Apakah di Jombang sudah terkontrol masalah Covid-19? Jawabannya belum, karena naik terus. pemerintah baru sekitar dua minggu untuk gencar melaku-



Rapid test di Jombang digencarkan untuk mengantisipasi peningkatan penyebaran kasus corona

kan pelacakan kasus baru," ujar Iskandar.

Prinsip utama penyakit ini menurutnya adalah menular. Masyarakat harus paham bahwa ini penyakit yang menular lewat cairan, hidung dan mulut makanya harus pakai masker. "Sering cuci tangan, khawatir ada percikan di tangan. Jaga jarak agar saat batuk, bersin, atau bicara tidak menulari kita," ujarnya.

Iskandar juga mengingatkan masyarakat untuk tidak merasa aman berkunjung ke daerah yang kasus Covid-19 rendah. Ini bukan berarti daerah lain aman, mungkin saja daerah tersebut tidak melakukan pelacakan lewat rapid test. Landasan sarannya, saat ini rumah sakit rujukan Covid-19 di Jombang selalu penuh. Sehingga kemampuan tim kesehatan dan pemangku kebijakan harus ditingkatkan.

Pemerintah Jombang juga harus bisa mengelola kasus impor, yaitu kasus Covid-19 didapatkan dari daerah lain. Bisa karena kunjungan atau bekerja di daerah lain. "Untuk apakah upaya pemerintah maksimal maka mari kita lihat dan pantau," tandasnya. (ist)

## URAI KEMACETAN DI JALAN PAHLAWAN, PEMKOT MADIUN SIAPKAN JALUR ALTERNATIF

Madiun-Guna mengurangi kepadatan lalu-lintas di sepanjang Jalan Pahlawan Kota Madiun, Walikota Madiun berencana mempersiapkan jalur alternatif. Jalur tersebut diantaranya di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pandan, yang nantinya akan dipecah menjadi dua arah.

Walikota Madiun menyadari jika di sepanjang areal Jalan Pahlawan nantinya akan terjadi kepadatan lalu lintas. Mengingat, saat ini kawasan tersebut sedang dilakukan proses pembangunan infrastruktur pusat wisata di Kota Pendekar.

"Jalan Pahlawan nantinya akan menjadi pusat hiburan bagi anak-anak hingga lansia. Karena itu, keamanan dan keselamatan pengunjung wajib dijaga. Dengan pemecahan arus lalu lintas, diharapkan jumlah kendaraan yang melewati Jalan Pahlawan bisa ditekan," ujar walikota, Kamis (18/7).

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemkot Madiun juga berencana melakukan penu-



Jalan Pahlawan Kota Madiun bakal menjadi pusat wisata

tupan Jalan Pahlawan pada hari-hari tertentu dari mobil dan motor. Menurutnya hanya kendaraan antik keluaran di atas tahun 1950 yang boleh melintas.

"Jadi, suasana tempo dulunya akan lebih terasa. Pengunjung tidak hanya menikmati suasana, tapi juga dapat melihat pameran mobil antik dengan mudah," papar-

nya.

Sementara itu, kantong-kantong parkir juga disiapkan di basement Sumber Umis sebelah Barat yang mampu menampung 1.000 motor. Selain itu, juga beberapa kantong parkir di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Kalimantan. "Saat ini masih pembenahan," imbuhnya. (Sur)

## AKIBAT PILKADA MUNDUR, ADA 456 RIBU DAFTAR PEMILIH BARU

Jakarta-Kementerian Dalam Negeri memberikan tambahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pilkada 2020 kepada KPU. Data ini ada pemilih baru sebagai dampak Pilkada ditunda dari September ke Desember.

Data pemilih tambahan yang diserahkan kepada KPU adalah 456.256 orang. Sehingga DP4 atau data pemilih (mentah) Pilkada di 270 daerah total menjadi 105.852.716 jiwa.

Penyerahan DP4 ini disampaikan langsung oleh jajaran Kemendagri dan dihadiri secara virtual oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito mengatakan, ia tidak bisa hadir secara langsung di Gedung KPU karena akan mendampingi Menkopolkum Mahfud MD untuk kunjungan kerja ke provinsi NTT. "Pada kesempatan ini beberapa kontribusi telah diberikan Kemendagri terkait kebijakan yang berhubungan dengan pemda. Kemudian kebijakan mengenai masalah penganggaran. Ini terus berlangsung dan akan kami terus dukung," kata Tito di acara itu, Kamis (18/6).

Ia pun memastikan pemerintah akan mendukung KPU dalam semua aspek terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. "Hari ini diserahkan DP4 tambahan. Karena kita tahu bahwa ada penundaan jadwal dari rencana September 2020 ke Desember 2020, maka mengakibatkan adanya tambahan-tambahan pemilih yang potensial karena usia yang bertambah," ujar Tito.

Tito kemudian berpesan kepada KPU

untuk menjaga kerahasiaan data pemilih tersebut. Sebab, itu merupakan bagian daripada hak privasi dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. "Data-data ini yang akan kami berikan akan melengkapi data-data yang sebelumnya telah diberikan. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan sampai penetapan DPT," jelas eks Kapolri itu. "Sekaligus juga kita jaga kerahasiaan karena ini menyangkut privasi yang harus kita comply karena rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi negara kita," imbuhnya.

Tito menambahkan, pemerintah memastikan akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada. Agar pilkada tersebut bisa berjalan dengan lancar.

"Saya tetap akan menjaga hubungan baik dengan semua lembaga terkait agar pilkada Desember 2020 di situasi yang tidak biasa yaitu adanya wabah COVID-19 ini dapat berlangsung dengan baik insya Allah dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dan tetap dalam keadaan sehat," tutup Tito.

### Targetkan Partisipasi 77,5%

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menargetkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 sebesar 77,5 persen. Angka itu terbilang cukup tinggi mengingat Pilkada 2020 pada 9 Desember akan digelar di tengah pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Target kita untuk Pilkada nanti partisipasinya sebesar 77,5 persen (dari total 106 juta pemilih)," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam sebuah diskusi virtual,



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Arief menjelaskan, ada beberapa faktor penentu tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Tentu salah satunya terkait bencana pandemi Covid-19. Akan tetapi, kata Arief, ada juga faktor di luar itu seperti calon kepala daerah yang cenderung tidak disukai rakyat. Hal itu, sesuai dari hasil riset beberapa lembaga pemilu nasional maupun internasional.

Maka dari itu, menurut Arief, berkaitan dengan tingkat partisipasi sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU semata. Melainkan menjadi bagian daripada tugas semua pihak. "Maka tugas kita semua untuk yakinkan pemilih harus gunakan hak pilihnya. Nah KPU menyediakan kerangka teknisnya untuk menjamin mereka terjaga dengan menyediakan APD di setiap TPS. Karena untuk sekarang faktor itu adalah penentu atau pengaruh dari partisipasi dari pemilu di tengah pandemi ini," tutupnya.(ist)

## KPU KOTA BLITAR VERIFIKASI CALON INDEPENDEN DENGAN PENGAMANAN KETAT

Blitar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar mulai mempersiapkan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan (independen), diantaranya pengamanan ketat dari kepolisian. Sebab jumlah pasangan calon independen di Pilwali Kota Blitar tahun 2020 ini ada 3 pasangan, sehingga rawan terjadi gesekan antar pendukung

Disampaikan Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Rangga Bisma Aditya jika sesuai jadwal tahapan Pilwali Kota Blitar tahun 2020, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dilaksanakan pada 24 Juni - 12 Juli 2020. "Saat ini juga sudah dilakukan koordinasi dengan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Blitar," tutur Rangga, Kamis (18/6).

Dijelaskan Rangga koordinasi juga terkait standar teknis pelaksanaan verifikasi faktual, tenaga tambahan dan pengamanan. Dalam pelaksanaannya nanti akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 level pertama, yaitu wajib menggunakan masker dan membawa hand

sanitizer. "Sementara verifikasi faktual untuk yang termasuk wilayah zona merah, petugas akan menggunakan face shield," jelasnya.

Selanjutnya untuk pengamanan, Rangga mengaku sudah berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota. Nantinya masing-masing kelurahan akan dikawal oleh 3 personel kepolisian, untuk menghindari kendala berkaitan dengan keamanan. Pengawasan pengamanan memang lebih ketat, karena paslon perorangannya jumlahnya cukup banyak ada 3 pasangan. "Sehingga untuk mengantisipasi gesekan antar pendukung pasangan calon yang mungkin saja terjadi," tandasnya.

Diungkapkan Rangga untuk mendukung kekuatan tenaga PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual tersebut, KPU juga akan merekrut tenaga tambahan sebanyak 35 orang untuk diterjunkan ke masing-masing kelurahan. Guna membantu anggota PPS di Kota Blitar, yang jumlah seluruhnya 63 orang.

Adapun jumlah dokumen data dukungan, dari 3 pasangan calon perseorangan



Komisioner KPU Kota Blitar berkoordinasi dengan KBO Polres Blitar Kota terkait tahapan Pilwali Kota Blitar Tahun 2020

yang perlu diverifikasi faktual sebanyak 35.295 dukungan. "Jumlah dokumen banyak, tidak mungkin 3 anggota PPS bisa menyelesaikan dalam waktu 14 hari. Sehingga PPS dan PPK akan merekrut tambahan tenaga verifikasi" ungkapnya.

Ditambahkan Rangga sebagai upaya pemantapan persiapan tenaga verifikasi faktual, KPU Kota Blitar juga akan melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) 20 - 22 Juni 2020 ini.(ais)



# PEMERINTAH DAN SWASTA MENYAMBUT BAIK GELIAT PARIWISATA DUNIA

Foto : unsplash/@atik1616

**S**panyol berencana membuka bisnis pariwisata untuk turis internasional pada minggu depan, 21 Juni 2020 – membuat para traveler dapat melepaskan kerinduannya dengan pariwisata negara ini.

Dilansir Lentera Today (Senin, 15/6/2020), Negeri Matador tersebut membuka perbatasannya dengan negara-negara anggota Zona Schengen UE dan Inggris pada 21 Juni 2020. Traveler yang berasal dari negara-negara tersebut tidak perlu menjalani karantina selama 2 minggu ketika tiba di Spanyol.

Spanyol merupakan salah satu negara yang travel dan tourism-nya memiliki kontribusi cukup besar terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni 14,3 persen.

### **Mesir Membuka Bandara**

Sementara itu, Pemerintah Mesir akan membuka seluruh bandara yang melayani penerbangan internasional mulai 1 Juli 2020. Penerbangan komersial umum ditutup sejak Maret lalu untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19.

Menteri Penerbangan Publik Mohammed Manar Enabah, diberitakan Lentera Today (Senin, 15/6/2020), menyebut pembukaan penerbangan itu mengiringi geliat pariwisata untuk turis asing akan dibatasi di lokasi-lokasi wisata di tiga provinsi pesisir.

Enabah dan Menteri Pariwisata

Khaled al-Anani, yang juga hadir dalam acara temu media itu, memaparkan, pandemi telah mematikan industri pariwisata Mesir—yang disebut pemerintah menyumbang lima persen perekonomian negara. Namun menurut para analis bisa mencapai 15 persen jika pekerjaan dan investasi terkait industri ini juga disertakan.

### **Indonesia Optimis**

Presiden Joko Widodo melalui video conference, beberapa waktu lalu meminta dilakukan langkah-langkah mitigasi menyambut geliat pariwisata. Pertama, dia meminta program perlindungan sosial kepada sektor pariwisata tepat sasaran.

Kedua, realokasi anggaran dari Kementerian Pariwisata harus terarah kepada program yang dapat menyerap banyak tenaga kerja selama masa pandemi.

Ketiga, diadakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini guna memastikan mereka dapat bertahan dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

Kalangan swasta juga menyambut baik sinyal positif pariwisata dunia. Mukharam Khadafi, CEO Manaya Indonesia, Biro Travel penyelenggara Haji&Umrah, menilai sudah saatnya pariwisata kembali bangkit.

"Dunia pariwisata akan kembali bergeliat setelah beberapa bulan

vakum. Pasca pandemi akan terjadi tren baru dalam berwisata," ujar Khadafi selaku penyelenggara 'Napak Tilas Jejak Para Nabi nBumi Palestin' dan tur negara Timur Tengah lainnya.

Tren baru itu, misalnya wisatawan diminta mematuhi protokol kesehatan. Seperti pengecekan suhu tubuh, mewajibkan cuci tangan, dan menggunakan masker serta face shield, termasuk adanya pembatasan jumlah penumpang pesawat, dan bus.

Khadafi memprediksi, dengan adanya kenormalan baru itu wajar jika nantinya akan berimbas pada kenaikan biaya perjalanan.

Tri Andhi Suprihartono, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha, Investasi dan IT, DPP Asosiasi Pengusaha Jawa Timur menyebut, kalangan pengusaha ikut bergembira.

Dibukanya bandara Mesir, misalnya, menunjukkan kembali bergeliatnya sektor pariwisata dan wisatawan untuk menikmati kehidupan normal baru dengan lebih optimis.

Mesir menjadi salah satu primadona tujuan wisata bagi masyarakat Indonesia. Selain bisa memberi nuansa baru terjalannya kembali hubungan wisata juga terbangunnya kembali hubungan usaha dan dagang (ekonomi) di kalangan pengusaha.

"Kenormalan baru tentu memberikan optimisme bahwa kehidupan akan terus berlanjut dengan lebih baik," harap Andhi (ABH).



Foto : unsplash/Bernard Hermant

# TREN PERUBAHAN OLAHRAGA YANG POPULER DAN MEREDUP SELAMA PANDEMI

**S**elama masa pandemi virus Corona (Covid-19), aktivitas fisik masyarakat di seluruh dunia mengalami perubahan. Maklum, mereka harus mengisolasi diri di rumah dan menghindari kegiatan di luar rumah.

Kegiatan olahraga di luar ruangan seperti lari, berenang, dan bersepeda mulai berkurang. Tetapi bukan berarti masyarakat menghentikan rutinitas olahraganya.

Sebaliknya, banyak masyarakat yang

melakukan olahraga di dalam ruangan atau fitness sebagai alternatif pilihan yang dilakukan baik oleh atlet profesional maupun masyarakat dengan gaya hidup aktif.

Demikian, analisis yang dilakukan oleh Garmin, brand navigasi GPS dan perangkat nirkabel terhadap aktivitas fisik atau olahraga masyarakat selama pandemi Covid-19.

Berikut perubahan aktivitas fisik pengguna Garmin di seluruh dunia saat pandemi:

## 1. Langkah Harian Menurun

Data pengguna Garmin, langkah harian masyarakat seluruh dunia pada April 2020 menurun sebesar 12 persen jika dibandingkan dengan April tahun lalu, termasuk Indonesia dengan penurunan yang cukup signifikan.

## 2. Olahraga Terukur Meningkat

Walaupun jumlah langkah atau pergerakan secara general jelas terjadi. Namun, saat diamati lebih dalam, data pengguna yang hanya berfokus pada kegiatan olahraga yang tercatat (logged activities) di perangkat Garmin justru memperlihatkan peningkatan jumlah langkah sebesar 24 persen di seluruh dunia.

Hal ini terjadi karena kecenderungan masyarakat yang mengganti langkah harian pada aktivitas normal mereka dengan melakukan olahraga yang terukur seperti walking, lari, indoor cycling dan aktivitas lainnya.

## 3. Bersepeda di ruangan kian populer

Terdapat perubahan pada jenis aktivitas fisik yang dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pada data di bawah ini, Garmin mengilustrasikan beberapa aktivitas fisik yang semakin populer saat pandemi di masing-masing negara.

Bersepeda dalam ruangan (indoor cycling) menjadi aktivitas fisik yang mendapatkan popularitas tertinggi di berbagai negara selama pandemi berlangsung. Indonesia adalah salah satu negara di mana indoor cycling mengalami peningkatan terbesar pada bulan April 2020.



## 4. Aktivitas meredup selama pandemi

PSBB yang diterapkan di hampir seluruh negara berdampak pada beberapa jenis aktivitas fisik yang juga mengalami penurunan. Diantara aktivitas fisik lain, berenang menjadi kegiatan yang paling terpengaruh oleh pandemi.

Masyarakat tidak mengurangi porsi berenang tetapi menghentikan aktivitas renang secara total, seperti yang divisualisasikan pada data di bawah ini.

Pada masa pandemi seperti saat ini, para perenang tidak lantas berdiam diri, tetapi mereka tetap berlatih di rumah seperti yang dilakukan oleh atlet triatlon asal Kanada, Paula Findlay.

"Karena semua kolam renang di Oregon tempat saya tinggal ditutup, saya banyak melakukan latihan kebugaran (gym) dan kekuatan di rumah. Saya berusaha untuk menyerupai gerakan otot dan teknik yang dilakukan saat berenang," ucap Findlay.

Tingkat perubahan persentase pada data bergantung pada jumlah populasi dan seberapa ketat penerapan aturan PSBB di masing-masing negara. Negara-negara dengan aturan yang lebih longgar cenderung memiliki penurunan aktivitas yang tidak terlalu signifikan (Ist).





# YUK! TONTON GERHANA MATAHARI CINCIN DI AKHIR PEKAN

**B**adan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan pada akhir pekan ini, tepatnya Minggu (21 Juni 2020), wilayah Indonesia akan dilewati jalur Gerhana Matahari Cincin (GMC)

BMKG mengungkapkan wilayah yang terlewati jalur cincin pada Gerhana Matahari Cincin 21 Juni 2020 ini adalah Kongo, Sudan Selatan, Ethiopia, Yaman, Oman, Pakistan, India, Cina, dan Samudera Pasifik.

"GMC 21 Juni 2020 ini juga dapat diamati di sedikit Afrika bagian Utara dan Timur, Asia termasuk Indonesia, Samudra Hindia, sebagian negara Eropa, Australia bagian Utara, dan Samudera Pasifik berupa Gerhana Matahari Sebagian," tulis BMKG laman BMKG, Senin (15/6/2020).

Gerhana Matahari adalah peristiwa terhalangnya cahaya Matahari oleh Bulan sehingga tidak semuanya sampai ke Bumi. Gerhana Matahari Cincin terjadi ketika Matahari, Bulan, dan Bumi tepat segaris dan pada saat itu piringan Bulan yang teramati dari Bumi lebih kecil daripada piringan Matahari.

Akibatnya, saat puncak gerhana, Matahari akan tampak seperti cincin, yaitu gelap di bagian tengahnya dan

terang di bagian pinggirnya.

Dalam laporan lengkapnya, BMKG mengungkapkan bahwa GMC 21 Juni 2020 ini akan melewati 432 pusat kota dan kabupaten di 31 provinsi berupa Gerhana Matahari Sebagian, dengan magnitudo terentang antara 0,000 di Kepanjen, Jawa Timur sampai dengan 0,522 di Melonguane, Sulawesi Utara.

Masih ada 83 pusat kota lainnya, yaitu dua kota di Bengkulu, tujuh kota di Lampung, sepuluh kota Jawa Tengah, dan tujuh kota di Jawa Timur, serta semua kota di Jawa Barat (terkecuali Indramayu), Banten, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta tidak akan dilalui gerhana ini, karena nilai magnitudo gerhananya kurang dari 0.

Dalam laporannya, BMKG mengungkapkan bahwa waktu terjadinya gerhana di setiap lokasi akan berbeda-beda. Menurut BMKG, di Indonesia, waktu mulai gerhananya paling awal adalah di Sabang, Aceh, yang terjadi pada pukul 13.16.00,5 WIB.

Adapun kota yang waktu mulai gerhananya paling akhir adalah di Kepanjen, Jawa Timur, yaitu pukul 15.19.49,3 WIB.

Sementara itu, BMKG juga memperkirakan waktu Puncak Gerhana akan berbeda-beda di setiap daerah.

Di Indonesia, daerah yang akan mengalami waktu saat puncak gerhana paling awal adalah kota Sabang, Aceh, yang terjadi pada pukul 14.34.52,4 WIB. Kota dengan waktu puncak paling akhir adalah Agats, Papua, yaitu pukul 17.37.26,3 WIT.

Adapun waktu Kontak Akhir paling awal akan terjadi di Tais, Bengkulu yang terjadi pada pukul 15.06.39,8 WIB dan waktu Kontak Akhir paling akhir akan terjadi di Melonguane, Sulawesi Utara, pada pukul 17.31.44,9 WITA.

BMKG juga memperkirakan Gerhana Matahari Cincin (GMC) 21 Juni 2020 dapat diamati di Indonesia berupa Gerhana Matahari Sebagian, kecuali di sebagian besar Jawa dan sebagian kecil Sumatera bagian Selatan.

Pada 5 Juli 2020 juga akan terjadi Gerhana Bulan Penumbra (GBP) yang tidak dapat diamati di Indonesia. Sementara itu Gerhana Bulan Penumbra (GBP) 20 November 2020 dapat diamati di wilayah Indonesia bagian Barat menjelang gerhana berakhir, serta Gerhana Matahari Total (GMT) 14 Desember 2020 yang tidak dapat diamati di Indonesia. Yuk, tonton Gerhana Matahari! (Ist)

# HOAX

## BABY OIL BISA BUNUH KUTU RAMBUT

Apakah kamu memiliki masalah kutu rambut? Meski katanya baby oil bisa membasminya, tapi menurut dokter produk bayi itu hanya berfungsi membuat 'pingsan'. Pengobatan terbaik tetap menggunakan sampo khusus anti kutu rambut.

**K**utu rambut memang membuat gatal dan cenderung sulit dibasmi, meskipun memakai sampo anti-kutu. Melansir usnews, Ellie Brownstein, seorang dokter spesialis anak di Greenwood Health Center, University of Utah Amerika Serikat memperingatkan, pengobatan rumahan untuk menghilangkan kutu rambut seperti menggunakan baby oil sebetulnya hanya membuat kutu lemas atau 'pingsan' untuk sementara waktu. Dengan begitu akan lebih mudah bagi kamu untuk membersihkannya dari kulit kepala.

Tapi, satu-satunya cara yang aman dan efektif untuk mengobati kutu di rambut adalah dengan menggunakan sampo anti-kutu atau obat dari resep dokter. Pasalnya, meski kutunya sudah terlepas dari rambut, telur kutu (nits) belum tentu mati dan sangat mungkin masih menempel di rambut.

Selain itu, tidak semua orang cocok dengan bahan-bahan tersebut. Bagi orang yang memiliki kulit sensitif, penggunaan bahan-bahan seperti minyak zaitun, mayones, baby oil, dan lain sebagainya mungkin malah menimbulkan reaksi alergi.

Maka dari itu, ketimbang harus coba-coba cara menghilangkan kutu rambut dengan pengobatan ala rumahan, sebaiknya berkonsultasi ke dokter. Dokter dapat menentukan pengobatan yang tepat sesuai dengan kondisi Anda.

American Academy of Pediatrics (AAP) melaporkan bahwa cara menghilangkan kutu rambut yang paling efektif adalah dengan pakai obat antikutu. Obat anti-kutu ini tersedia dalam berbagai macam varian mulai dari krim bilas, sampo, gel, mousse, atau produk rambut lainnya. Anda bisa mendapatkan obat kutu ini dengan atau tanpa resep dokter.

Obat kutu hanya boleh digunakan jika rambut Anda terbukti kutuan. Gunakan obat antikutu sesuai petunjuk pemakaian obat yang ada di kemasan atau sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter.

Penting juga diperhatikan bahwa obat antikutu tidak boleh diberikan pada bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun, kecuali dokter menganjurkan hal tersebut.

Berhubung kutu adalah hewan yang

sangat kecil, Anda dapat menggunakan kaca pembesar untuk membantu melihat kutu dengan jelas. Anda juga dapat menggunakan sisir kusut (serit) untuk membuang kutu rambut dari kulit kepala.

Selain itu, kutu dapat menyebar melalui penggunaan barang-barang secara bergantian. Pakaian, seprai, sisir, sikat rambut, ikat rambut, topi, bantal, dan selimut adalah media penyebaran kutu yang paling umum.

Itu sebabnya, selama menjalani pengobatan, pastikan Anda tidak menggunakan barang-barang tersebut secara bergantian dengan orang lain untuk sementara waktu. (ist)



## KPK Endus (dari hal 1)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil kajian program Kartu Prakerja. Ditemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek dalam program Kartu Prakerja.

Aspek pertama adalah proses pendaftaran. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan telah mengkompilasi data pekerja yang terkena PHK dan sudah dipadankan NIK-nya berjumlah 1,7 juta pekerja terdampak.

"Namun, faktanya hanya sebagai kecil yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu. Sedangkan sebagian besar pendaftar yaitu 9,4 juta pendaftar bukan target yang disasar," ujar Alex melalui daring pada Kamis (18/6).

Kemudian, KPK melihat penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp 30,8 miliar itu tidak efisien. "Berlebihan pakai fitur face recognition. Kalau NIK-nya benar, kan langsung keluar semua datanya," ucap Deputi Penindakan KPK Pahala Nainggolan yang juga berada di konferensi pers.

Lalu, untuk aspek kedua yakni kemitraan dengan platform digital. KPK mendapati kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Alex pun menyebut jika 5 dari 8 platform digital yang tergabung memiliki konflik kepentingan. "Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ucap dia.

Selanjutnya, aspek ketiga adalah materi pelatihan. Alex mengatakan, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia).

Lebih lanjut, materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org.

Aspek terakhir adalah pelaksanaan program. "KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena

metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," kata dia.

Ada dua faktor, kata Alex, yang menjadi alasan mengapa KPK menemukan program pelatihan berpotensi fiktif. Pertama, lembaga Pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. "Kedua, peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," ujar Alex.

Anggaran yang dialokasikan tak tanggung-tanggung, sebesar Rp 20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang. Komposisi nilai total insentif pasca pelatihan yaitu sebesar Rp 2.400.000/orang dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp1 50.000/orang, lebih besar dari nilai bantuan pelatihannya itu sendiri yaitu sebesar Rp 1.000.000/orang.

KPK merekomendasikan agar pemerintah menunda penerimaan peserta program Kartu Prakerja gelombang (batch) 4. Hal ini lantaran dalam kajian KPK, ditemukan sejumlah masalah terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Diketahui, hingga saat ini pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 4 belum dibuka. Pasalnya, saat ini Komite Kartu Prakerja masih melakukan evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan program tersebut. "Menunda pelaksanaan [Kartu Prakerja] batch 4 sampai dilaksanakan perbaikan tata kelola program Kartu Prakerja," katanya.

Menanggapi ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahril Adian memastikan, tidak ada kejanggalan dalam program Kartu Prakerja. Namun, Donny menyebut, pemerintah akan mengevaluasi kembali terkait Kartu Prakerja tersebut. "Jadi saya kira temuan atau masukan itu menjadi bahan evaluasi kami," jelas Donny.

Seperti diketahui, sejak pintu pendaftaran dibuka, 11 April lalu, kartu prakerja tak pernah sepi dari kontroversi. Kritik langsung menghambur, ketika proses pendaftaran tak mulus akibat peserta yang membludak. Dalam waktu kurang dari 20 jam, sebanyak 1,2 juta orang mendaftar. Padahal, target sampai akhir tahun hanya dipatok 5,6 juta peserta. Jumlahnya kini bahkan telah membengkak, menjadi sekitar 9 juta pendaftar.

Kontroversi kian riuh dan kusut ketika merembet ke berbagai isu lainnya. Salah satunya soal manfaat program kartu prakerja. Formulanya dianggap

tidak cocok untuk diterapkan di masa pandemi corona. Ketika banyak karyawan terkena PHK, kok malah diberi pelatihan. Yang lebih dibutuhkan adalah dana tunai untuk penopang hidup. Program ini pun dinilai hanya menguntungkan delapan perusahaan platform digital, mitra pemerintah dalam pengadaan training online.

Perlu diingat, kartu prakerja bukanlah ide baru. Program ini merupakan janji Jokowi dalam kampanye Presiden pada Maret 2019 lalu. Ide awalnya adalah untuk memberikan pelatihan tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Yang disasar adalah para tenaga kerja muda yang belum mendapat pekerjaan, termasuk yang terkena PHK.

Sementara itu, program Kartu Prakerja Pemerintah yang telah dilakukan sampai tahap III, hingga saat ini insentif bagi peserta yang telah lulus di tahap awal belum juga diterima. Hal ini diungkapkan oleh peserta Kartu Prakerja yang telah lulus pada tahap I dan II. Pertama adalah Yolanda (27) yang merupakan peserta kartu pra kerja pada gelombang I. Ia mengatakan sudah menerima sertifikat kelulusan ikut program sejak bulan lalu dan insentif dijanjikan akan diterima pada 10 Juni 2020, namun sampai saat ini belum diterima.

"Harusnya sih dari 10 Juni. Saya sudah email juga tapi balasannya otomatis sama dengan ke teman-teman lainnya," ujarnya.

Selanjutnya ada Juanda (43) yang mengikuti program Kartu Prakerja pada gelombang ke II. Dirinya juga dijanjikan akan menerima insentif pada 9 Juni 2020 tapi belum menerima juga sampai saat ini. "Sertifikat sudah diterima dan di dashboard pra kerja saya sudah masuk insentif tapi masih proses terus sampai sekarang. Jadinya pusing. Saya juga sudah email tapi zonk," curhat Juanda.

Adapun dalam balasan email dari info Prakerja, dikatakan bahwa sistem pra kerja sedang mengalami antrean tinggi sehingga meminta para peserta untuk bersabar. Dengan balasan pesan otomatis tersebut, keduanya mengaku kecewa dengan janji-janji pemerintah dalam membantu masyarakat.

Hingga saat ini, Pemerintah melalui tim kartu pra kerja belum memberikan jawaban resmi. Informasi saja, Pemerintah menjanjikan total manfaat sebesar Rp 3,55 juta per peserta. Sebesar Rp 1 juta diberikan dalam bentuk voucher untuk membeli paket pelatihan. Selanjutnya, insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Sisanya uang survei masing-masing Rp 50.000 untuk tiga kali survei. (ist,ins)

Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si  
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURHj. ANIK MASLAGHAH, S.Pd., M.Si  
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURKUSNADI, SH., M.Hum  
KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURH. ANWAR SADAD, M.Ag  
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURSAHAT TUA P. SIMANJUNTAK, SH  
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

## DPRD JATIM APRESIASI PEMPROV ATAS OPINI WTP KE-9 LHP-BPK RI

Atas raihan opini WTP ini, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menyampaikan apresiasi besar pada keberhasilan Pemprov Jatim. Terkait catatan dana BOS memang agak susah, sebab dana tersebut masuk ke dalam pencatatan APBD Provinsi Jatim, tapi dananya langsung ditransfer ke rekening sekolah. "Jadi kita itu cuman mencatat dan tidak mengerti fisiknya dan kita diminta untuk meminta laporan. Makanya, Gubernur juga menyampaikan beri kami regulasi," tandasnya.

Dengan adanya regulasi tersebut, lanjut Kusnadi, maka tidak menjadi masalah ketika dana BOS langsung masuk ke sekolah. Jika tidak ada regulasi, maka Kusnadi meminta supaya dana BOS tapi jangan dicatatkan dalam APBD Provinsi. "Ini kelemahan regulasi saja," tegasnya.

Sementara, terkait dengan Bansos, Kusnadi mengatakan Provinsi Jatim sudah mengikuti ketentuan Mendagri. Namun, dari yang disampaikan BPK, ada tambahan pengesahan dari bendahara negara yang selama ini belum ada.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak juga menyampaikan apresiasinya pada Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, di tahun pertama pemerintahannya telah mampu mempertahankan opini WTP. "Pertama, saya mengapresiasi kinerja tim keuangan eksekutif yang dipimpin Pak Sekda, BPKAD dan Inspektorat. Tiga ini yang menentukan bagus tidaknya pembukuan dan laporan keuangan Pemprov Jatim beserta seluruh OPD-OPD dengan kepatutannya memberikan laporan setiap kegiatan," tandasnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan diraihnya opini WTP juga mengangkat citra Sekretariat DPRD Jatim. "Berarti sistem keuangan kita juga bagus, walaupun ada rekomendasi, namun itu lebih banyak pada persoalan di luar program-program dan ini juga menjadi catatan buat kita," tuturnya.

Terkait catatan yang disampaikan termasuk soal bantuan sosial, Sahat bilang punya tanggung jawab untuk mengawal sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan laporannya juga tepat waktu. "Jadi tidak hanya sekedar menjadi aspirator tindak lanjut reses di dapil, tapi anggota

dewan juga punya kewajiban untuk mengawal mulai dari proses sampai pelaporannya itu bisa tuntas dan paripurna," katanya.

Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim juga memberikan apresiasi. Hal ini disampaikan Kodrat Sunyoto, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim. "Ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata baik dari DPRD Jatim dan pihak manajemen Pemprov Jatim untuk terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan dengan menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik dan benar," terang Kodrat.

Kodrat yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim berharap Pemprov Jatim terus mempertahankan raihan opini WTP ini. Dia meminta supaya Pemprov jangan sampai lengah dan kendor dalam mengelola keuangan.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terimakasih atas semua arahan, penjelasan, dan rekomendasi strategis yang disampaikan oleh Anggota V BPK RI. "Kami mencapat beberapa hal yang terkait catatan penemuan hasil pemeriksaan yang harus kita tindaklanjuti untuk 60 hari ke depan. Tentu semua akan menjadi catatan bagi kami di jajaran Pemprov Jatim," katanya.

Tata kelola keuangan yang dilakukan oleh jajaran Pemprov Jatim semua berjalan atas pengawasan yang sangat berkualitas dari DPRD Provinsi Jatim. Hal itu dilakukan baik melalui publik hearing maupun melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jatim.

"Kebersamaan ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kami agar seluruh proses pelaksanaan rupiah demi rupiah APBD yang ada dalam mandat Pemprov Jatim semuanya akan terkawal dan terus akan kita tingkatkan tidak sekedar dari sisi penggunaannya tersampaikan, tetapi juga dari sisi mafaat dan produktifitas setiap rupiah yang kita anggarkan bersama melalui APBD Provinsi Jatim," katanya.

Kemudian, lanjut Khofifah, pada bidang pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, Pemprov Jatim membutuhkan penguatan berupa payung regulasi yang lebih teknis, misalnya catatan dengan pengelolaan dana BOS. Sebab dana BOS sudah ditransfer langsung ke Kabupaten dan Kota.

Sekda Prov Jatim, Heru Tjahjono mengatakan terkait dengan catatan tersebut tentu ada perbaikan dan akan ditindaklanjuti selama 60 hari kedepan. Dia menandatangani tidak ada kerugian negara dalam hal ini, hanya saja ada administrasi yang harus diperbaiki. (ufi/adv)

Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019.

Penyampaian opini WTP dilakukan secara virtual oleh anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar dari Gedung BPK RI dan diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (18/6/2020).

Anggota V BPK RI, Prof Dr Bahrullah Akbar mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemprov Jatim termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah direncanakan, maka BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jatim tahun 2019. "Dengan demikian, Pemprov Jatim telah berhasil mendapatkan dan meraih serta mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang kesembilankalinya," katanya.

Meski demikian, BPK juga menemukan dalam laporan keuangan internal terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang tidak mempengaruhi secara material atas kewajiban pelaporan keuangan 2019. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan Pemprov belum memiliki prosedur baku untuk melaporkan penerimaan hibah langsung yang diterima OPD. Kemudian tindak lanjut Dinas Pendidikan atas pelaksanaan dana BOS tahun 2018 belum optimal, sehingga masih terjadi permasalahan berulang di tahun 2019. Selain itu juga terkait dengan pemanfaatan fasilitas pelabuhan Probolinggo di Dinas Perhubungan oleh PT Delta Arta Bahari Nusantara tidak sesuai prosedur.